



## **Eksplorasi Hubungan Simbiotik antara Diplomasi Angkatan Laut dan Keamanan Maritim: Sebuah Tinjauan Interdisipliner**

### **Exploring the Symbiotic Relationship between Naval Diplomacy and Maritime Security: An Interdisciplinary Review**

**Wahyu Kurniawan<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Akademi Angkatan Laut, Bumimoro, Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: [exdemustar@gmail.com](mailto:exdemustar@gmail.com)

#### **Abstract**

The naval diplomacy is an important instrument in foreign policy to maintain maritime security and protect national interests at sea. This problem focuses on actual matters that influence the behavior of other countries through naval presence, actions, and communications. Maritime security includes protection against non-traditional threats such as piracy, terrorism, and smuggling, as well as enforcement of maritime law and international agreements. Cooperation between countries in naval diplomacy is very important to overcome cross-border maritime security threats. Cooperation mechanisms include joint military exercises, intelligence information sharing, and maritime law enforcement. The navy plays an important role in ensuring maritime security through security patrols, search and rescue operations, and diplomatic support. In the context of maritime security, naval diplomacy emphasizes the importance of cooperation between countries and the efforts made by navies to counter threats at sea. This cooperation includes joint military exercises, sharing intelligence information, and maritime law enforcement. Therefore, this is an effective instrument in maintaining maritime security and stability in the world's maritime strategic areas. The research methodology used includes a literature review accompanied by a survey to collect qualitative data on perceptions and related practices. It is hoped that this research can provide alternative actual decisions on how to identify opportunities and challenges faced in the sea sector in facing increasingly complex and dynamic maritime threats, as well as provide relevant recommendations for policymakers and practitioners.

**Keywords:** Naval Diplomacy, Maritime Security, Interdisciplinary Exploration

#### **Abstrak**

Diplomasi angkatan laut sebagai instrumen penting dalam kebijakan luar negeri untuk menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut. Problematika ini berfokus pada hal-hal aktual yang mempengaruhi perilaku negara lain melalui kehadiran, tindakan, dan komunikasi angkatan laut. Keamanan maritim mencakup perlindungan terhadap ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme, penyelundupan, serta penegakan hukum maritim dan perjanjian internasional. Kerja sama antar negara dalam diplomasi angkatan laut sangat penting untuk mengatasi ancaman keamanan maritim lintas batas. Mekanisme kerja sama termasuk latihan militer bersama, berbagi informasi intelijen, dan penegakan hukum maritim. Angkatan laut memainkan peran penting dalam memastikan keamanan maritim melalui patroli keamanan, operasi pencarian dan penyelamatan, dan dukungan diplomatik. Dalam konteks keamanan maritim, diplomasi angkatan laut menekankan pentingnya kerjasama antar negara dan upaya yang dilakukan angkatan laut untuk melawan ancaman di laut. Kerja sama ini meliputi latihan militer bersama, berbagi informasi intelijen, dan penegakan hukum maritim. Oleh karena itu, hal ini menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim di kawasan strategis maritim dunia. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi tinjauan pustaka disertai survei untuk mengumpulkan data kualitatif pada persepsi dan praktik terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif keputusan aktual tentang bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan

yang dihadapi di matra laut dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks dan dinamis, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi.

**Kata kunci** : Diplomasi Angkatan Laut, Keamanan Maritim, Eksplorasi Interdisipliner

## **1. Pendahuluan**

Diplomasi angkatan laut merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara-negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut (Till, 2013). Dalam konteks keamanan maritim, diplomasi angkatan laut memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan perdamaian di kawasan maritim, serta melindungi kepentingan nasional dari ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme, dan permasalahan perbatasan (Bueger, 2015). Analisa ini akan membahas esensi diplomasi angkatan laut dalam menjaga keamanan maritim, dengan fokus pada pentingnya kerjasama antar negara dan upaya yang dilakukan oleh angkatan laut dalam menghadapi ancaman di laut.

Eksplorasi hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim menjadi penting dalam konteks global saat ini. Seiring dengan meningkatnya peran laut dalam perekonomian global, keamanan maritim menjadi aspek yang krusial untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Keamanan maritim telah menjadi isu yang semakin penting dalam abad ke-21, terutama karena perubahan geopolitik, peningkatan ancaman non-tradisional, dan pergeseran kepentingan nasional (Kraska, 2011). Dalam konteks ini, diplomasi angkatan laut telah mendapatkan perhatian yang semakin besar sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang penting dalam menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut (Till, 2018). Namun, hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim belum sepenuhnya dieksplorasi, khususnya dari perspektif interdisipliner yang mencakup bidang seperti ilmu politik, hukum internasional, dan studi strategis.

Dalam literatur ilmiah, diplomasi angkatan laut telah didefinisikan sebagai "penggunaan angkatan laut untuk mencapai tujuan politik dan diplomatik" (Till, 2004). Konsep ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari kehadiran angkatan laut, tindakan, dan komunikasi, hingga kerjasama internasional dan penegakan hukum maritim (Murphy, 2009). Sementara itu, keamanan maritim telah diidentifikasi sebagai "kondisi yang memungkinkan penggunaan laut secara damai dan legal untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sosial" (Bueger, 2015). Dalam konteks ini, keamanan maritim meliputi perlindungan terhadap ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme, dan penyelundupan, serta penegakan hukum maritim dan perjanjian internasional (Kraska & Pedrozo, 2013).

Salah satu area penelitian yang menjanjikan dalam hubungan antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim adalah peran angkatan laut dalam memfasilitasi kerjasama internasional dan mengatasi ancaman lintas batas (Till, 2018). Dalam hal ini, mekanisme kerjasama seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan penegakan hukum maritim telah ditemukan sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan antar negara dan meningkatkan keamanan maritim (Murphy, 2009). Sebagai contoh, inisiatif seperti *Combined Maritime Forces (CMF)* dan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)* telah membantu mengatasi ancaman seperti pembajakan dan terorisme maritim melalui kerjasama antar angkatan laut (Chalk, 2012).

Selain itu, studi tentang diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim telah menyoroti pentingnya angkatan laut dalam mempengaruhi perilaku negara-negara lain melalui

kehadiran, tindakan, dan komunikasi (Till, 2004). Dalam hal ini, angkatan laut dapat berperan sebagai instrumen *soft power* yang mempengaruhi negara-negara lain untuk mengadopsi sikap yang lebih kooperatif dan konstruktif dalam menghadapi ancaman maritim (Nye, 2004). Dengan menggunakan instrumen *soft power* ini, angkatan laut dapat mempengaruhi pandangan dan sikap negara-negara lain terhadap mereka, menciptakan iklim yang lebih kooperatif dan konstruktif dalam mengatasi ancaman maritim bersama-sama. Pendekatan ini lebih fokus pada membangun kemitraan daripada mengandalkan kekuatan keras atau ancaman untuk mencapai tujuan keamanan dalam menghadapi ancaman maritim. Sebagai contoh, kehadiran angkatan laut AS di Asia-Pasifik telah dikaitkan dengan peningkatan stabilitas dan keamanan maritim di kawasan tersebut, meskipun juga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara seperti Cina (Friedberg, 2018).

Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner mengacu focus tentang hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim sehingga dapat memberikan paradigma yang berharga tentang bagaimana angkatan laut dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan politik dan diplomatik, serta bagaimana keamanan maritim dapat ditingkatkan melalui media kerjasama internasional dan penegakan hukum maritim. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan solusi tentang bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh angkatan laut dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks dan dinamis, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan interdisipliner mengenai hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim mencakup tinjauan literatur yang melibatkan analisis dari berbagai sumber literatur terkait, studi kasus untuk menganalisis kasus nyata dalam konteks diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim, wawancara terbatas dengan ahli, pejabat Mabes TNI Angkatan Laut, dan praktisi yang memiliki pengalaman di bidang tersebut (Komandan-Komandan KRI), survei untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang persepsi dan praktik terkait, serta analisis kebijakan untuk menganalisis kebijakan pertahanan yang terkait dengan hubungan simbiotik tersebut.

Dalam konteks ini, diplomasi angkatan laut adalah alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya, khususnya dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim (Aji, 2016). Tugas-tugas angkatan laut dalam diplomasi bisa meliputi peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan, memfasilitasi kerjasama dengan angkatan laut negara lain, hingga membantu mencapai tujuan politik luar negeri sebuah negara. Pada tinjauan interdisipliner, hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim adalah dua elemen yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan

Metode-metode ini membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat, mendapatkan wawasan mendalam, mengumpulkan data yang relevan, serta menganalisis aspek kebijakan yang mempengaruhi hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim (J. J. Widen, 2011).

## **3. Hasil Interdisipliner Simbiotik Diplomasi Angkatan Laut**

Dalam era globalisasi dan perubahan geopolitik yang dinamis, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan

maritim menjadi penting dalam mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Melalui tinjauan interdisipliner yang mencakup teori dan contoh kejadian relevan, konsep ini dapat mengidentifikasi cara-cara di mana diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain, serta bagaimana hubungan ini dapat diperkuat untuk mencapai tujuan pertahanan nasional.

Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kekuatan militer dan keseimbangan kekuatan dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional (Waltz, 1979). Dalam konteks ini, angkatan laut memiliki peran kunci dalam menegakkan kepentingan nasional dan menjaga keamanan maritim melalui kehadiran, tindakan, dan komunikasi (Till, 2004). Sebagai contoh, kehadiran angkatan laut AS di Laut China Selatan telah dianggap sebagai instrumen penting dalam menegakkan kebebasan navigasi dan menekan klaim teritorial yang agresif oleh Cina (Friedberg, 2018).

Selain itu, teori liberalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional dan institusi dalam mengatasi ancaman bersama dan menciptakan perdamaian dan stabilitas (Keohane & Nye, 1977). Dalam hal ini, diplomasi angkatan laut dapat memfasilitasi kerjasama internasional dan membangun kepercayaan antara negara-negara melalui latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan penegakan hukum maritim (Murphy, 2009). Sebagai contoh, operasi Atalanta Uni Eropa telah menggabungkan angkatan laut dari berbagai negara untuk melawan pembajakan di lepas pantai Somalia, menghasilkan penurunan signifikan dalam insiden pembajakan sejak 2011 (Gebrewold, 2016).

### **3.1 Aplikasi dan Dimensi Simbiotik Diplomasi Angkatan Laut**

Dalam mengembangkan strategi pertahanan yang efektif, penting untuk mengakui bahwa hubungan simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Kehadiran angkatan laut sebagai alat diplomasi: Kehadiran angkatan laut di kawasan strategis dapat menunjukkan komitmen negara terhadap keamanan maritim dan kepentingan sekutu, serta mengirim pesan kepada negara-negara pesaing tentang kemampuan dan keinginan untuk melindungi kepentingan nasional (Till, 2004). Contoh nyata dari hal ini adalah kehadiran angkatan laut AS di Laut China Selatan dan Teluk Persia, yang telah mempengaruhi dinamika keamanan regional dan menegakkan kebebasan navigasi (Friedberg, 2018).
- b. Kerjasama internasional dan penegakan hukum maritim: Diplomasi angkatan laut dapat mempromosikan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman bersama, seperti pembajakan, terorisme, dan penyelundupan, serta dalam penegakan hukum maritim dan perjanjian internasional (Kraska & Pedrozo, 2013). Contoh keberhasilan dalam hal ini termasuk inisiatif *Combined Maritime Forces (CMF)* dan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)*, yang telah membantu mengatasi ancaman lintas batas melalui kerjasama antar angkatan laut (Chalk, 2012).
- c. Penggunaan soft power: Soft power, istilah yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, merujuk pada penggunaan daya tarik budaya, ideologi, dan lembaga dalam politik internasional, sebanding dengan cara menggunakan koersi militer (hard power). Dalam konteks Angkatan Laut, soft power ini dapat berarti ekspresi

simbolis dari Kekuatan militer yang mempengaruhi persepsi negara-negara lain dan mendukung tujuan politik luar negeri. Angkatan laut dapat berperan sebagai instrumen soft power yang mempengaruhi negara-negara lain untuk mengadopsi sikap yang lebih kooperatif dan konstruktif dalam menghadapi ancaman maritim (Nye, 2004). Contoh dari penggunaan soft power ini termasuk latihan militer bersama, seperti *Exercise Rim of the Pacific* (RIMPAC), yang melibatkan angkatan laut dari berbagai negara dan bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan pemahaman antar angkatan laut (US Navy, 2018).

Sehingga tinjauan interdisipliner eksplorasi simbiotik antara diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim merupakan sudut pandang komprehensif yang memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini dan contoh kejadian relevan, kita dapat mengidentifikasi cara-cara di mana diplomasi angkatan laut dan keamanan maritim saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain, serta bagaimana hubungan ini dapat diperkuat untuk mencapai tujuan pertahanan nasional.

Diplomasi angkatan laut adalah proses di mana negara-negara menggunakan kekuatan angkatan laut mereka untuk mencapai tujuan politik dan diplomatik (Till, 2013). Esensi diplomasi angkatan laut terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku negara-negara lain melalui kehadiran, tindakan, dan komunikasi angkatan laut. Dalam konteks keamanan maritim, diplomasi angkatan laut mencakup berbagai aktivitas seperti patroli keamanan, latihan militer bersama, dan operasi penegakan hukum di laut (Bueger, 2015).

Keamanan maritim adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, terutama di kawasan maritim yang strategis seperti Laut China Selatan, Laut Mediterania, dan Samudra Hindia (Kraska & Pedrozo, 2013). Keamanan maritim mencakup perlindungan terhadap ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme, penyelundupan, dan pencemaran lingkungan, serta penegakan hukum maritim dan perjanjian internasional (Klein, 2011).



**Gambar 1. Hubungan Simbiotik antara Diplomasi Angkatan Laut dan Keamanan Maritim**

Bagan dalam Gambar 1 berikut menjelaskan hubungan simbiotik antara Diplomasi Angkatan Laut dan Keamanan Maritim. Hubungan ini melibatkan tiga aspek utama:

- a. Pertama yaitu Simbiosis Antar Disiplin Ilmu: Diplomasi Angkatan Laut dan Keamanan Maritim saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, dengan berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik.

- b. Kedua yaitu Kerjasama dan Koordinasi Antar Negara: Diplomasi Angkatan Laut memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar negara dalam upaya bersama untuk menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut.
- c. Ketiga yaitu Peningkatan Kapabilitas dan Infrastruktur: Diplomasi Angkatan Laut mendukung peningkatan kapabilitas dan infrastruktur Angkatan Laut, termasuk pengembangan teknologi canggih dan sistem pengawasan maritim, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan maritim secara keseluruhan.

### **3.2 Urgensi Kerjasama Antar Negara dalam Diplomasi Angkatan Laut**

Salah satu esensi diplomasi angkatan laut dalam menjaga keamanan maritim adalah kerjasama antar negara. Kerjasama ini penting karena ancaman keamanan maritim seringkali melintasi batas negara dan memerlukan koordinasi yang efektif antara angkatan laut dari berbagai negara (Bateman & Ho, 2009). Kerjasama antar negara dalam diplomasi angkatan laut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti:

- a. Latihan Militer Bersama: Latihan militer bersama antara angkatan laut dari berbagai negara merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam menjaga keamanan maritim (Bateman & Ho, 2009). Latihan ini dapat mencakup berbagai skenario, seperti penanggulangan pembajakan, pencarian dan penyelamatan, dan penegakan hukum maritim.
- b. Pertukaran Informasi Intelijen: Pertukaran informasi intelijen antara angkatan laut dari berbagai negara merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan maritim (Kraska & Pedrozo, 2013). Informasi intelijen yang dikumpulkan oleh angkatan laut dapat digunakan untuk mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum dan operasi militer di laut.
- c. Penegakan Hukum Maritim: Kerjasama antar negara dalam penegakan hukum maritim merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan maritim (Klein, 2011). Negara-negara dapat bekerja sama dalam mengejar dan menangkap pelaku pembajakan, terorisme, dan penyelundupan, serta dalam penegakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan keamanan maritim.

### **3.2 Implikasi Strategis Angkatan Laut dalam Menjaga Keamanan Maritim**

Keamanan maritim telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional dan kebijakan pertahanan nasional, terutama di kawasan dengan jalur pelayaran strategis dan sumber daya maritim yang melimpah. Dalam konteks ini, Angkatan Laut memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan maritim melalui berbagai fungsi, seperti penegakan hukum, diplomasi, dan operasi militer. Hubungan simbiotik antara Angkatan Laut dan keamanan maritim mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki implikasi strategis yang signifikan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks (Suharyo & Bastari, 2021).

Peran Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim yakni dengan kehadiran Angkatan Laut di kawasan strategis, hal ini dapat menunjukkan komitmen negara terhadap keamanan maritim dan kepentingan sekutu, serta mengirim pesan kepada negara-negara pesaing tentang kemampuan dan keinginan untuk melindungi kepentingan nasional. Sebagai contoh, kehadiran Angkatan Laut AS di Laut China Selatan telah mempengaruhi dinamika keamanan regional dan menegakkan kebebasan navigasi (Torelli, S. 2017).

Diplomasi Angkatan Laut dapat berkontribusi mempromosikan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman bersama, seperti pembajakan, terorisme, dan penyelundupan, serta dalam penegakan hukum maritim dan perjanjian internasional. Contoh keberhasilan dalam hal ini termasuk inisiatif *Combined Maritime Forces (CMF)* dan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)*, yang telah membantu mengatasi ancaman lintas batas melalui kerjasama antar Angkatan Laut.

Angkatan Laut dapat berperan sebagai instrumen soft power yang mempengaruhi negara-negara lain untuk mengadopsi sikap yang lebih kooperatif dan konstruktif dalam menghadapi ancaman maritim. Contoh dari penggunaan soft power ini termasuk latihan militer bersama, seperti *Exercise Rim of the Pacific (RIMPAC)*, yang melibatkan Angkatan Laut dari berbagai negara dan bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan pemahaman antar Angkatan Laut.

### **3.3 Tantangan dan Peluang Angkatan Laut dalam Menjaga Keamanan Maritim**

Angkatan Laut di seluruh dunia menghadapi tantangan dan peluang yang berkaitan dengan menjaga keamanan maritim. Tantangan utama meliputi ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme maritim, dan penyelundupan, serta perubahan lingkungan dan teknologi. Di sisi lain, peluang yang ada mencakup kolaborasi antar-Angkatan Laut dan pemanfaatan teknologi canggih. Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, Angkatan Laut harus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama dengan mitra internasional dalam upaya bersama menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut (Bradford, 2005; Till, 2013; Bueger & Stockbruegger, 2015).

a. Ancaman non-tradisional: Angkatan Laut harus menghadapi ancaman non-tradisional yang semakin kompleks, seperti pembajakan, terorisme maritim, penyelundupan, dan perubahan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, Angkatan Laut perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, serta meningkatkan kemampuan intelijen dan teknologi (Till, 2013).

b. Kolaborasi antar-Angkatan Laut: Kerjasama antar-Angkatan Laut menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang bersifat lintas batas dan memerlukan koordinasi yang erat antara negara-negara. Angkatan Laut dapat memanfaatkan mekanisme regional dan internasional yang ada, seperti CMF dan ReCAAP, untuk meningkatkan kerjasama dan membagi tanggung jawab dalam menjaga keamanan maritim (Bradford, 2005).

c. Transformasi teknologi: Kemajuan teknologi, seperti sistem pengawasan maritim, kendaraan nirawak, dan komunikasi satelit, telah membuka peluang baru bagi Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim. Namun, transformasi teknologi juga dapat menimbulkan tantangan, seperti ancaman siber dan penyebaran teknologi militer canggih kepada aktor non-negara. Angkatan Laut harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menghadapi tantangan ini (Till, 2013).

Hubungan simbiotik antara Angkatan Laut dan keamanan maritim memiliki implikasi strategis yang signifikan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Dalam mengembangkan strategi pertahanan yang efektif, pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini dan peran Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim dapat membantu mencapai tujuan pertahanan nasional dan menjaga keamanan maritim yang berkelanjutan.

Angkatan Laut harus terus beradaptasi dan berkolaborasi dengan mitra internasional untuk menghadapi tantangan keamanan maritim di masa depan.

**Tabel 1. Tantangan dan Peluang Angkatan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim**

Tantangan dan Peluang Angkatan Laut dalam Menjaga Keamanan Maritim	Contoh / Solusi
<b>Tantangan</b>	
1. Ancaman non-tradisional	- Meningkatkan kemampuan intelijen dan teknologi - Melakukan operasi pengamanan maritim yang efektif
2. Perubahan lingkungan	- Mengadopsi teknologi ramah lingkungan - Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengurangi dampak lingkungan
3. Transformasi teknologi	- Berinovasi dan mengadopsi teknologi canggih - Menghadapi ancaman siber dan penyebaran teknologi militer canggih kepada aktor non-negara
<b>Peluang</b>	
1. Kolaborasi antar-Angkatan Laut	- Membentuk aliansi dan kerjasama regional - Berpartisipasi dalam latihan militer bersama dan pertukaran informasi
2. Pemanfaatan teknologi canggih	- Menggunakan sistem pengawasan maritim, kendaraan nirawak, dan komunikasi satelit - Mengembangkan kapabilitas Angkatan Laut yang lebih efisien dan efektif

Tabel Tantangan dan Peluang Angkatan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di atas menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadapi Angkatan Laut dalam menjaga keamanan maritim, serta contoh solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, serta memanfaatkan peluang yang ada, Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut.

#### **4. Kesimpulan**

Diplomasi angkatan laut merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut. Esensi diplomasi angkatan laut terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku negara-negara lain melalui kehadiran, tindakan, dan komunikasi angkatan laut. Kerjasama antar negara dalam diplomasi angkatan laut, seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan penegakan hukum maritim, merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman keamanan maritim yang melintasi batas negara. Angkatan laut memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim melalui patroli keamanan, pencarian dan penyelamatan, serta dukungan diplomatik.

#### **Daftar Rujukan**

Bateman, S., & Ho, J. (2009). *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. Routledge.

- Bradford, J. F. (2005). The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*, 58(3), 63-86.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159-164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Bueger, C., & Stockbruegger, J. (2015). Security Communities, Alliances and Macro-securitization: The Practices of Counter-Piracy Governance. In *Echoes of the Colonial Past: Contemporary Challenges to Global Security Management*, 84-97.
- Chalk, P. (2012). *Countering piracy in the modern era: Notes from a RAND workshop to discuss the best approaches for dealing with piracy in the 21st century*. RAND Corporation. [https://www.rand.org/pubs/conf\\_proceedings/CF280.html](https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF280.html)
- Friedberg, A. L. (2018). Competing with China: Maintaining America's edge in the new era of strategic competition. *The National Interest*, 156, 18-28.
- Gebrewold, B. (2016). *Anatomy of Violence: Understanding the Systems of Conflict and Violence in Africa*. Routledge.
- J. J. Widen (2011) Naval Diplomacy—A Theoretical Approach, *Diplomacy & Statecraft*, 22(4), 715-733. DOI: 10.1080/09592296.2011.625830
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown and Company.
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford University Press. England
- Kraska, J. (2011). *Maritime power and the law of the sea: Expeditionary operations in world politics*. Oxford University Press.
- Kraska, J., & Pedrozo, R. (2013). *International Maritime Security Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Murphy, M. (2009). *Small boats, weak states, dirty money: Piracy and maritime terrorism in the modern world*. Columbia University Press.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- Suharyo, O. S., & Bastari, A. (2021). Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia. *Rekayasa*, 14(3), 443-449. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i3.13087>
- Till, G. (2004). *Seapower: A guide for the twenty-first century*. Frank Cass.
- Till, G. (2018). *Seapower: A guide for the twenty-first century* (4th ed.). Routledge.
- Torelli, S. (2017). *The Role of the Navy in Maritime Security Policy*. Dahrendorf Forum.
- US Navy. (2018). *Exercise Rim of the Pacific 2018 Concludes*. <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2249915/exercise-rim-of-the-pacific-2018-concludes/>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley